

The Moderating Role of Information Technology Ease of Use on Vehicle Tax Compliance among Generation Z in Bandung City

Dhea Amelia Putri ^{a,1,*}, Farah Latifah Nurfauziah ^{b,2}, Citra Kharisma Utami ^{c,3}

^{a,b,c} Universitas Islam Nusantara, Indonesia.

¹dheaptrr346@gmail.com; ²farahlatifah@uninus.ac.id; ³citrakharismautami@uninus.ac.id

*Correspondent Author; dheaptrr346@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

21-07-2026

Revised:

12-08-2026

Accepted:

03-09-2026

Keywords:

Trust in Government; Persepsi Keadilan Pajak; Kemudahan Teknologi Informasi; Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

Di antara berbagai pos penerimaan negara, pajak menempati porsi paling dominan, dan pada tingkat pemerintah daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercatat sebagai kontributor pajak daerah paling besar. Kendati nominal penerimaan PKB terus naik dari tahun ke tahun, laju kenaikan tersebut ternyata belum sejalan dengan pertambahan jumlah pemilik kendaraan bermotor. Penelitian ini disusun untuk mengkaji pengaruh *trust in government*, persepsi keadilan pajak, serta peran kemudahan teknologi informasi sebagai pemoderasi terhadap tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Desain penelitian mengikuti pendekatan kuantitatif deskriptif sekaligus verifikatif, dengan data primer dikumpulkan lewat penyebaran kuesioner kepada sampel terpilih. Sasaran populasi riset ini mencakup pemilik kendaraan bermotor dari kalangan generasi Z yang tinggal di wilayah Kota Bandung; total sampel yang berhasil dihimpun berjumlah 385 orang responden sesuai metode *Cochran*. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert 1-5. Pengujian data menempuh dua tahap analisis, yakni regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan *software SPSS*. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa *trust in government* tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan nilai signifikan 0,162. Sementara itu, persepsi keadilan pajak justru terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan Sig. 0,000. Di sisi lain, kemudahan teknologi informasi tidak berhasil berperan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh antara *trust* maupun keadilan terhadap kepatuhan pajak dengan masing-masing nilai Sig. > 0,05. Berdasarkan hasil koefisien determinasi dengan nilai 0,09 mengindikasikan bahwa faktor-faktor di luar cakupan penelitian justru memberikan pengaruh yang lebih dominan terhadap kepatuhan pajak.



Introduction

Menurut Laporan Perekonomian Jawa Barat Triwulan II tahun 2025, komponen pajak daerah tercatat sebagai penyumbang paling dominan bagi struktur penerimaan asli daerah pada periode tersebut, dengan kontribusi kurang lebih 87,95 persen dari keseluruhan capaian PAD provinsi ini (Nur, 2025). Di antara ragam pungutan pajak daerah yang berlaku, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menempati posisi sebagai salah satu sumber PAD paling besar bagi wilayah Jawa Barat. Setiap tahun, kenaikan jumlah unit kendaraan bermotor turut memberi sumbangsih cukup besar bagi capaian PAD lewat jalur PKB tersebut. Kendati begitu, pertumbuhan jumlah kendaraan tidak selamanya berbanding lurus dengan kenaikan penerimaan PKB, sehingga kepatuhan pembayaran pajak tetap menjadi tantangan yang menuntut pembenahan strategi administrasi perpajakan agar lebih optimal.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bandung 2023

Kategori	Tahun Kelahiran	Kelompok Umur	Total Penduduk
<i>Baby Boomers</i>	1946 – 1964	61 – 79	303.117
Generasi X	1965 – 1980	45 – 60	479.814
Milenial/Generasi Y	1981 – 1996	29 – 44	573.303
Generasi Z	1997 – 2012	13 – 28	609.236
<i>Generasi Alpha</i>	2013 – sekarang	0 – 12	541.133
Jumlah			2.506.603

Sumber: Badan Statistik Nasional (diolah peneliti)

Berdasarkan rilis Bapenda Jabar (2023) Jawa Barat, unit kendaraan bermotor yang tercatat berpotensi menjadi objek pajak di provinsi ini telah menembus angka 17,03 juta unit. Di banyak wilayah Jawa Barat, tak terkecuali Kota Bandung, struktur usia penduduk pada tahun 2023 didominasi oleh kelompok kelahiran 1997 sampai dengan 2012 yang lazim disebut Generasi Z. Kelompok usia tersebut merupakan salah satu segmen berukuran besar secara nasional, dengan porsi mencapai kisaran 27 hingga 28 persen dari total penduduk Indonesia. Sebagai kelompok yang berperan besar dalam mobilitas ekonomi, konsumsi barang dan jasa, sekaligus kewajiban membayar pajak daerah semacam PKB, ketaatan Gen Z menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan bagi penerimaan negara. Seandainya seluruh individu Gen Z taat menunaikan kewajiban perpajakannya, APBN Indonesia diproyeksikan mengalami kenaikan yang berarti dan turut mengakselerasi pembangunan nasional. Sebagai kelompok *digital natives* yang lekat dengan arus informasi berteknologi, generasi ini pada umumnya memiliki keterpaparan informasi lebih luas serta kecenderungan kuat memanfaatkan teknologi, sehingga berpeluang mendorong kepatuhan pajak apabila diiringi pemahaman dan pandangan positif terhadap sistem perpajakan (Qudsy & Bameshwara, 2024).

Tabel 2. Rasio PKB Kota Bandung Per Kendaraan

Tahun	PKB (Rp)	Kendaraan (Unit)	PKB/Kendaraan
2020	1.216.448.246.175	1.568.802	775.399
2021	1.262.789.502.250	1.552.747	813.262
2022	1.332.919.444.850	1.551.774	858.965

2023	1.369.813.814.400	1.562.688	876.575
2024	1.427.662.776.550	1.543.521	924.939

Sumber: Open Data Jabar Badan Pendapatan Daerah (diolah peneliti)

Dipandang dari kacamata teori, kenaikan populasi kendaraan bermotor selaku objek PKB semestinya diiringi kenaikan penerimaan pajak yang proporsional. Namun kondisi rata-rata penerimaan PKB tiap unit kendaraan yang justru menurun atau stagnan di tengah membludaknya populasi kendaraan mengisyaratkan adanya jarak antara potensi pajak yang ada dengan realisasi penerimaan sesungguhnya. Kesenjangan ini bukan semata persoalan struktural, melainkan juga terkait erat dengan profil demografis para wajib pajak. Berdasarkan teori kepatuhan pajak, gejala tersebut menandakan munculnya kecenderungan perilaku tidak taat, khususnya berupa penundaan atau tunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (Sa'diyah dkk., 2021).

Kondisi ideal kepatuhan tercermin saat wajib pajak menuntaskan kewajiban perpajakan atas inisiatif sendiri, dengan perhitungan tepat, serta sesuai batas waktu yang berlaku. Riset-riset terdahulu mengungkap sejumlah unsur yang turut menentukan tingkat ketaatan para pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya, mencakup rasa percaya terhadap otoritas pemungut pajak, perlakuan yang adil atau tidak bagi para wajib pajak, serta besaran sanksi maupun mutu layanan yang disajikan pemerintah (Sahri Romadon, 2023). Di luar faktor kepercayaan pada pemerintah, anggapan bahwa pungutan pajak yang dibayarkan tak sepadan dengan hasil yang dinikmati juga dapat mengikis semangat wajib pajak untuk konsisten membayar PKB. Sebaliknya, saat sistem perpajakan dipandang adil oleh wajib pajak, sikap yang timbul cenderung lebih positif sehingga tingkat kepatuhan dalam menunaikan kewajiban pajak pun ikut naik (Herlinanur dkk., 2025).

Khusus di kalangan Generasi Z, mudahnya mengakses teknologi informasi bisa jadi memperkuat sekaligus mengendurkan keterkaitan antara persepsi keadilan, *trust* pada otoritas pajak, dan tingkat kepatuhan perpajakan. Gejala ini muncul lantaran keterbukaan akses digital melahirkan sistem pembayaran pajak yang jauh lebih bening, ringkas, dan hemat waktu. Berbarengan dengan laju kemajuan teknologi, kemudahan mengakses serta memanfaatkan layanan informasi perpajakan menjadi unsur pendukung yang tak kalah krusial bagi generasi ini. Kajian Lannai & Insyirah (2024) mendapati bahwa faktor kemudahan teknologi via *platform e-commerce* punya dampak berarti bagi jalannya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian oleh Tambun & Muhtiar (2019) pada Marilyn dkk. (2022) menyatakan bahwa wajib pajak yang menampung kemajuan teknologi informasi secara baik senantiasa meningkatkan kepatuhan pajaknya. Oleh karena itu, kemudahan teknologi informasi menjadi variabel yang memoderasi pengaruh *trust in government* dan persepsi keadilan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepraktisan layanan semacam itu bukan cuma mendongkrak tingkat kepatuhan pajak, melainkan juga ikut menekan risiko finansial maupun sengketa hukum yang berpotensi muncul.

Method

Riset ini mengambil pendekatan kuantitatif berbasis survei dengan data primer dari 385 responden Generasi Z pemilik kendaraan bermotor di Kota Bandung yang dipilih menggunakan teknik *non-probability sampling* dan rumus *Cochran*. Kuesioner menggunakan skala Likert sebagai instrumen pengumpulan data. Seluruh instrumen diuji menggunakan uji validitas korelasi bivariat dan uji reliabilitas *Cronbach's Alpha*. Sebelum analisis regresi, data diuji melalui uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas (Sugiyono, 2023). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi

linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA), yang didukung oleh uji statistik t, uji statistik F, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kapasitas model dalam menerangkan fenomena yang dikaji (Ghozali, 2021).

Results and Discussion

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor Gen Z di Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah responden adalah 385 responden dengan data responden laki-laki 144 responden dan wanita 241 responden. Mayoritas usia 21-24 tahun sebanyak 295 responden dengan pekerjaan pelajar/mahasiswa.

Uji Validitas

Uji validitas ditempuh dengan menyandingkan Rhitung terhadap Rtabel. Rtabel dihitung lewat rumus $df = n - 2$; dengan n sejumlah 385 responden, diperoleh $df = 385 - 2 = 383$ pada tingkat signifikansi 0,5%, sehingga Rtabel bernilai 0,100. Nilai Rhitung sendiri didapat dari hasil pengujian statistik, dengan kriteria kelolosan berupa Rhitung yang melampaui Rtabel. Hasil pengujian memperlihatkan seluruh butir pernyataan pada tiap variabel riset ini dinyatakan **valid**.

Uji Reliabilitas

Suatu variabel dianggap lolos syarat reliabilitas bila skor *Cronbach's Alpha* yang diperoleh berada di atas 0,60 sehingga semakin mendekati angka satu, semakin mantap pula tingkat keajegan yang ditunjukkan.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

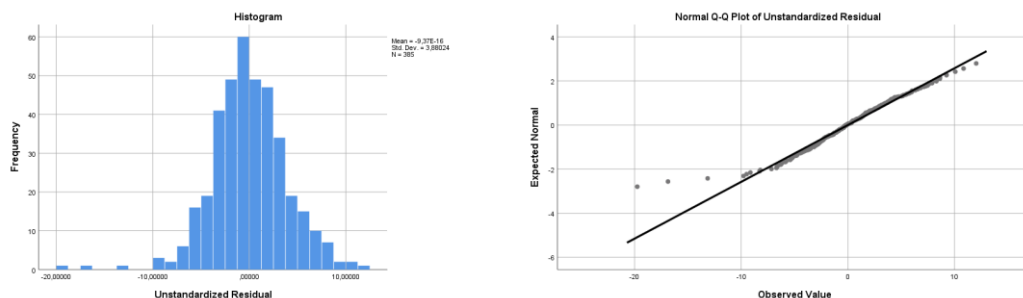
Variabel Penelitian	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
<i>Trust in Government</i>	0,894	Reliabel
Persepsi Keadilan Pajak	0,852	Reliabel
Kemudahan Teknologi Informasi	0,869	Reliabel
Kepatuhan Pajak Kendaraan	0,647	Reliabel

Sumber: Hasil SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan angka-angka pada tabel tersebut, seluruh butir kuesioner pada ketiga variabel X, Y, maupun Z dapat dikatakan telah memenuhi kriteria **reliabel**.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Hasil SPSS yang diolah, 2026

Diagram histogram hasil uji normalitas menampilkan kurva berbentuk lonceng yang cukup simetris dengan puncak memusat pada titik nol sumbu X pola yang menandakan

fungsi regresi riset ini telah memenuhi kelayakan asumsi normalitas. Guna memperkokoh temuan histogram, dilakukan pula evaluasi tambahan lewat *normal probability plot*, yang mengungkap sebaran titik data amatan condong mengikuti garis diagonal secara rapat. Simpulannya, data pada model regresi ini telah taat asumsi normalitas sehingga residualnya layak disebut berdistribusi **normal**.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

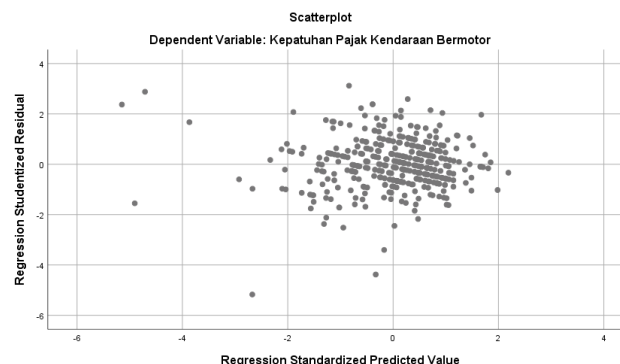
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	23,349	1,330	-	17,553	0,000	-	-
Trust in Government	-0,129	0,051	-0,188	-2,521	0,012	0,391	2,559
Persepsi Keadilan Pajak	0,156	0,071	0,179	2,207	0,028	0,330	3,026
Kemudahan Teknologi Informasi	0,275	0,047	0,386	5,890	0,000	0,506	1,978

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Hasil SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil di atas, seluruh angka *tolerance* yang didapat berada melampaui 0,1, sedangkan VIF tercatat tidak melebihi angka 10. Atas dasar itu, model riset ini dapat dinyatakan **bebas dari gejala multikolinearitas**.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil SPSS yang diolah, 2026

Grafik *scatterplot* memperlihatkan sebaran titik data amatan yang acak, baik di kuadran atas maupun bawah garis nol pada sumbu Y, tanpa membentuk pola tertentu yang khas. Atas dasar itu, riset ini dapat dinyatakan **bebas dari persoalan heteroskedastisitas**.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Kontribusi tiap variabel bebas secara sendiri-sendiri atas variabel terikat ditelusuri lewat uji parsial (uji t), yang menitikberatkan pada perbandingan angka signifikansi terhadap ambang *alpha* 0,05 (5%).

Tabel 5. Hasil Uji Statistik t

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	27,726	1,151	-	24,090	0,000
X1 TOTAL	-0,074	0,053	-0,107	-1,401	0,162
X2 TOTAL	0,334	0,067	0,384	5,011	0,000

a. Dependent Variable: YTOTAL

Sumber: Hasil SPSS yang diolah, 2026

Angka signifikansi *Trust in Government* (X1) yang tercatat 0,162, melampaui batas 0,05 mengonfirmasi bahwa variabel kepercayaan terhadap pemerintah ini tidak cukup kuat memengaruhi Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di kalangan Generasi Z Kota Bandung. Fakta ini menandakan bahwa *trust in government* bukanlah unsur tunggal penentu tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Sebaliknya, angka signifikansi Persepsi Keadilan Pajak (X2) yang tercatat 0,000 jauh di bawah 0,05 membuktikan variabel ini punya pengaruh nyata bagi Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Gen Z Kota Bandung. Ini bermakna, semakin tinggi persepsi keadilan pajak yang dirasakan responden, semakin besar pula peluang naiknya kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada kalangan Gen Z di Kota Bandung.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) ditempuh guna mengukur besaran pengaruh kolektif seluruh variabel bebas atas variabel terikat, dengan syarat angka signifikansi berada di bawah *alpha* 0,05 (5%).

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	663,026	2	331,513	20,075	,000 ^b
Residual	6308,132	382	16,513		
Total	6971,158	384			

a. Dependent Variable: YTOTAL

b. Predictors: (Constant), X2 TOTAL, X1 TOTAL

Sumber: Hasil SPSS yang diolah, 2026

Angka signifikansi sebesar 0,000 di bawah 0,05 pada tabel di atas mengonfirmasi bahwa *Trust in Government* beserta Persepsi Keadilan Pajak, secara serentak, punya pengaruh bermakna bagi Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Generasi Z Kota Bandung.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,308 ^a	0,095	0,090	4,064

a. Predictors: (Constant), X2 TOTAL, X1 TOTAL

b. Dependent Variable: YTOTAL

Sumber: Hasil SPSS yang diolah, 2026

Koefisien *R Square* (R²) yang tercatat 0,09, atau setara 9 persen, menandakan bahwa *Trust in Government* beserta Persepsi Keadilan Pajak baru sanggup menerangkan 9 persen variasi Kepatuhan Pajak; sisa 91 persennya ditentukan oleh unsur-unsur eksternal yang berada di luar jangkauan riset ini.

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)**Tabel 8.** Hasil Uji Parsial (Uji t) X1M

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	26,753	4,345	-	6,157	0,000
<i>Trust In Government</i>	-0,173	0,162	-0,252	-1,066	0,287
Kemudahan Teknologi Informasi	0,240	0,119	0,337	2,022	0,044
<i>Trust In Government</i> *Kemudahan Teknologi	0,003	0,004	0,251	0,716	0,474

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Hasil SPSS yang diolah, 2026

Uji interaksi antara *Trust in Government* dan kemudahan teknologi informasi memperoleh angka Sig. 0,474 di atas 0,05 sehingga terkonfirmasi bahwa faktor kemudahan teknologi gagal berperan sebagai pemoderasi hubungan *Trust in Government* dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Kendati begitu, dilihat secara terpisah, kemudahan teknologi informasi tetap terbukti punya pengaruh bermakna bagi kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t) X2M

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	24,370	3,911	-	6,231	0,000
Persepsi Keadilan Pajak	0,004	0,166	0,004	0,023	0,982
Kemudahan Teknologi Informasi	0,224	0,113	0,315	1,989	0,047
Persepsi Keadilan*Kemudahan Teknologi	0,001	0,004	0,085	0,282	0,778

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Hasil SPSS yang diolah, 2026

Sementara itu, uji interaksi persepsi keadilan pajak dengan kemudahan teknologi informasi mencatat angka Sig. 0,778, sehingga terbukti tidak ada pengaruh yang berarti. Simpulannya, faktor kemudahan teknologi informasi tak sanggup memperkuat ataupun memperlemah keterkaitan persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Meski demikian, secara terpisah, kemudahan teknologi informasi tetap terbukti punya pengaruh nyata bagi tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh *Trust in Government* terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Angka signifikansi 0,162 yang melampaui 0,05 menjadi dasar penolakan hipotesis pertama (**H1 ditolak**) dalam riset ini. Hal ini tidak sesuai dengan teori oleh Kirchler dkk. (2008) *Slippery Slope Framework* mengemukakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kekuatan (*power*) dan kepercayaan (*trust*). Simpulan ini selaras dengan temuan Kurniawan & Yuniar Larasati (2023), yang mendapati bahwa rasa percaya semata tidak lantas menjamin ketaatan wajib pajak. Fenomena ini mengisyaratkan, tinggi rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak serta-merta menjadi pendorong utama perilaku patuh pajak.

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Uji pengaruh persepsi keadilan pajak atas kepatuhan pajak kendaraan bermotor mencatat Sig. 0,000, sehingga hipotesis kedua (**H2 diterima**). Hal ini sejalan dengan *Justice Theory* oleh Greenberg & Baron (2003), yang menyatakan persepsi keadilan lahir dari cara seseorang menilai hasil yang ia terima. Kajian Anggraeni dkk. (2021) turut mendukung simpulan ini lewat temuan bahwa faktor keadilan berperan positif dan bermakna bagi ketaatan wajib pajak. Artinya, semakin wajib pajak merasa kebijakan serta praktik perpajakan sudah adil, semakin besar pula kesediaan mereka menerima kewajiban pajaknya secara sukarela.

Pengaruh simultan *Trust in Government* dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Uji F mencatat angka signifikansi 0,000, lebih kecil dari *alpha* 5%, sehingga hipotesis ketiga (**H3 diterima**). Hasil ini cocok dengan gagasan teori atribusi oleh Heider, yang menyebut keputusan bertindak seseorang dipengaruhi banyak faktor, termasuk unsur relasional semacam rasa percaya dan persepsi keadilan. Zainudin dkk. (2022) turut menyimpulkan hal serupa: penguatan kepercayaan pada pemerintah beriring persepsi keadilan pajak akan mendorong ketaatan perpajakan secara linier.

Pengaruh Kemudahan Teknologi Informasi dalam memoderasi pengaruh *Trust in Government* terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Uji interaksi *trust in government* dengan kemudahan teknologi informasi mencatat Sig. 0,474, melampaui 0,05, hingga hipotesis keempat (**H4 ditolak**). Hasil ini masuk akal bila menilik profil responden yang kebanyakan berstatus pelajar/mahasiswa. Sekalipun akses teknologi dibuat semudah mungkin, hal itu tak otomatis mendorong kepatuhan pajak selama kesanggupan finansial untuk membayar belum tersedia.

Pengaruh Kemudahan Teknologi Informasi dalam memoderasi pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Uji interaksi persepsi keadilan pajak dengan kemudahan teknologi informasi mencatat Sig. 0,778, melampaui 0,05, hingga hipotesis kelima (**H5 turut ditolak**). Kondisi ini sejalan dengan karakteristik responden yang didominasi rentang usia 21–24 tahun berstatus pelajar/mahasiswa, di mana keterbatasan kemampuan finansial pada fase ini menjadi kendala cukup berat. Sekalipun ditunjang kemudahan teknologi informasi, faktor tersebut kurang relevan bila responden belum mampu secara ekonomi membayar pajak, apalagi ketika mereka masih memandang sistem keadilan pajak belum sepenuhnya merata.

Conclusion

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut: Pertama, *Trust in Government* tidak terbukti memberi pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor pada Gen Z di Kota Bandung. Kedua, ditemukan pengaruh yang bermakna dari Persepsi Keadilan Pajak atas Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor pada Gen Z di Kota Bandung. Ketiga, *Trust in Government* beserta Persepsi Keadilan Pajak, secara serentak, terbukti berdampak nyata pada Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Gen Z di Kota Bandung. Keempat, peran Kemudahan Teknologi Informasi selaku pemoderasi hubungan *Trust in Government* dengan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Gen Z di Kota Bandung tidak terbukti. Kelima, peran Kemudahan Teknologi Informasi selaku pemoderasi hubungan Persepsi Keadilan Pajak dengan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Gen Z di Kota Bandung juga tidak terbukti.

References

- Anggraeni, W. A., Dahlan, M., & Yudianto, I. (2021). Determinan Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 2083. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.1007>
- Bapenda Jabar. (2023, Agustus 15). *Pajak Kendaraan Bermotor Dominasi Target Pendapatan Jabar di Semester I 2023*. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2023/08/15/pajak-kendaraan-bermotor-dominasi-target-pendapatan-jabar-di-semester-i-2023/>
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 IBM" SPSS" Statistics*.
- Greenberg, J., & Baron, R. A. (2003). *Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work*. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall.
- Herlinanur, N., Maritim, U., Ali, R., Reski, H., Universitas, A., Raja, M., Putri, A. H., Universitas, R., Wahjoe, A. H., Universitas, P., Haji, A., Jalan, A. :, Dompok - Tanjungpinang, R., & Riau, K. (2025). Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(6), 83-91. <https://doi.org/10.61722/JIEM.V3I4.5157>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kurniawan, F., & Yuniar Larasati, A. (2023). Pengaruh Faktor-Faktor Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 20(2), 140-156. <https://doi.org/10.26874/PORTOFOLIO.V20I2.376>
- Lannai, D., & Insyirah, A. A. (2024). Persepsi Kemudahan dan Keamanan Data dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Commerce. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7, 1958-1970. <https://doi.org/10.36778/JESYA.V7I2.1741>
- Marilyn, Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak. Dalam *Jurnal Pajak Indonesia* (Vol. 6, Nomor 1). www.djppr.kemenkeu.go.id
- Nur, M. (2025). *Laporan Perekonomian Peran Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi dalam Mendukung Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan II 2025*.
- Qudsy, S., & Bameshwara, A. (2024). Menyelaraskan Kepatuhan Pajak: Program Reward Digital Untuk Meningkatkan Partisipasi Fiskal Gen Z. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 4, 88.
- Sa'diyah, H. H., Putra, R., & Mugroho, M. R. (2021). Theory Of Attribution Dan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3, 51-69.

- Sahri Romadon, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* , 16(2), 244–248. <https://doi.org/10.51903/KOMPAK.V16I2.1260>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. www.cvalfabeta.com
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/JPI.V6I1.1616>